

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN TUGAS POKOK : Fungsi lainnya
- : Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bidang hukum, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.
- FUNGSI : 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan		
Meningkatkan efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah.	1. Prosentase Kebijakan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief). • Formulasi Pengukuran : Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan dibagi jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief) dikali 100 %. • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
	2. Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah agar tercapai IKU perangkat daerah Provinsi dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (Policy Brief). • Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi jumlah target IKU perangkat daerah dikali 100 % • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
Sasaran		
1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Prosentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menghitung seberapa banyak jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai kaidah pembentukan per-undang-undangan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Rancangan Produk Hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah rancangan produk hukum yang dihasilkan dikali 100 % Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatnya Efektifitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase efektifitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengkaji seberapa banyak jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan • Formulasi Pengukuran :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Daerah		<p>Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
	Peningkatan prosentase produk hukum daerah yang diinformasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak jumlah produk hukum yang diinformasikan melalui website JDI Hukum • Formulasi Pengukuran : Prosentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun ini dikurangi Prosentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun lalu • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
	Prosentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak kebijakan Pemerintah Provinsi dibidang hukum yang ditangani dan diselesaikan • Formulasi Pengukuran : Rerata ketercapaian target pelaksanaan kebijakan bidang hukum • Tipe Perhitungan : Kumulatif. • Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah